

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 2,039,844 dari 27,766,791 pada tahun 2015 menjadi 29,806,635 pada tahun 2016, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 782,834 dari 20,358,247 pada tahun 2015 menjadi 21,141,081 pada tahun 2016.

Secara umum pertumbuhan PDRB Kota Banjarbaru mengalami peningkatan khususnya dilihat dari pertumbuhan PDRB ADH Konstan namun mengalami fluktuatif pada pertumbuhan PDRB ADH berlaku. PDRB Kota Banjarbaru tahun 2011- 2016 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :

Tabel 2.1 PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2011 - 2016

Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku	PDRB atas Dasar Harga Konstan	Pertumbuhan PDRB ADH Berlaku (%)	Pertumbuhan PDRB ADH Konstan (%)
2011	18.805.422	17.751.525	8,88	2,78
2012	20.403.409	18.338.388	8,50	3,31
2013	22.304.533	19.607.655	9,32	3,35
2014	24.702.775	19.607.655	10,75	3,46
2015*	27.766.791	20.358.247	11,96	3,78
2016**	29.806.635	21.141.081	7,39	3,85

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru

*)Angka Sementara

**)Angka Sangat Sementara

Tabel 2.2 PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tahun	Nilai PDRB	
	Harga Berlaku (Rp)	Harga Konstan (Rp)
2011	3.902.313.000.000	3.683.619.000.000
2012	4.366.554.000.000	3.924.617.000.000
2013	4.943.727.000.000	4.183.368.000.000
2014	5.634.712.000.000	4.460.741.000.000
2015*	6.498.029.000.000	4.766.663.000.000
2016**	7.194.398.000.000	4.771.383.000.000



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Perekonomian Kota Banjarbaru dapat dilihat dari besaran PDRB, dimana selama tahun 2016 Kota Banjarbaru telah mampu menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 29.806.635 juta rupiah, yang jika dilihat dengan harga konstan sekitar 21.141.081 juta rupiah, meningkat dibandingkan dengan PDRB harga konstan tahun 2015 yang sebesar 20.358.247 juta rupiah. Dengan demikian pertumbuhan Kota Banjarbaru di tahun 2016 mencapai 3,78%.

Berdasarkan di tahun 2016, sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi terjadi di sektor jasa pendidikan 9,57%, sektor jasa keuangan 9,46 % sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,32%, dan jasa perusahaan 8,49%. Pertumbuhan yang relatif rendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,87%.

Deskripsi selengkapnya tentang perkembangan kondisi ekonomi di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
Tahun 2011-2016 (dalam persen)**

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,52	4,29	3,14	1,77	4,61
2	Pertambangan dan Penggalian	4,79	8,26	4,35	3,40	1,87
3	Industri Pengolahan	4,36	3,71	3,62	3,38	5,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,67	5,07	26,22	32,88	1,92
5	Pengadaan Air	1,97	2,63	7,54	7,01	7,76
6	Konstruksi	6,88	7,30	7,68	7,42	6,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	7,48	7,96	8,32	7,01	7,9
8	Transportasi dan Pergudangan	9,02	7,88	7,10	7,74	9,32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,96	5,06	6,05	6,42	7,04
10	Informasi dan Komunikasi	5,54	5,67	8,02	8,29	8,75
11	Jasa Keuangan	6,38	11,53	4,92	4,91	9,46
12	Real Estate	6,02	7,10	6,98	6,1	7,07
13	Jasa Perusahaan	5,37	7,39	7,02	5,18	8,49
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,96	5,83	5,93	8,68	2,05
15	Jasa Pendidikan	5,01	7,02	7,42	8,01	9,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,06	9,08	6,22	5,93	9,07
17	Jasa Lainnya	3,27	2,22	8,64	6,03	8,11
Total PDRB		6,54	6,59	6,68	6,91	6,95

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru secara umum selama periode 2011-2016 relatif stabil dalam kisaran 6%. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru berdasarkan harga konstan mencapai 6,54% dan meningkat menjadi 6,59% pada tahun 2013, meningkat kembali sebesar 6,63% untuk tahun 2014 dan sebesar 6,86% untuk tahun 2015, selanjutnya menjadi 6,95% di tahun 2017.

2.2 Kebijakan Keuangan

Manajemen Keuangan Daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang hakekatnya adalah salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam era otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyusun suatu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan anggaran yang mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga bagi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan Akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Banjarbaru diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Banjarbaru selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Banjarbaru.

Usaha Intensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah :

- Menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutahiran data Objek dan Subjek Pajak, Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
- Minimal 3 bulan sekali tim mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pengamanan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Usaha Ekstensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah:

- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah;
- Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas serta kebijakan alokasi anggaran program dan kegiatan pembangunan.

Pengalokasian anggaran ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan ke dalam dua puluh enam urusan wajib dan tujuh urusan pilihan dengan tetap mengacu kepada prinsip partisipasi masyarakat, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas dalam rangka mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good local governance*).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur Belanja Daerah adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan dan digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang bersifat umum. Sebaliknya, Belanja Langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan dan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Selain itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melihat pertumbuhan belanja lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan sehingga Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SILPA) cenderung tiap tahunnya menurun, maka kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada tahun 2017 ini akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2017 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu pengalokasian anggaran tahun 2017 tetap mendanai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas agenda pembangunan Kota Banjarbaru.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

4. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selanjutnya pada tahun 2016 ini alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan akan tetap dipertahankan minimal sebesar 20% dari total belanja dan alokasi anggaran belanja untuk bidang kesehatan akan ditingkatkan pada akhirnya akan menjadi 10% dari total belanja.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

6. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan
Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.
7. Optimalisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Dengan terbatasnya sumber-sumber pendanaan APBD Pemerintah Kota Banjarbaru maka pada tahun 2017 akan diupayakan kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak lagi dibiayai dari APBD atau melakukan pembiayaan dengan pola *cost sharing* antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini dimaksudkan agar dana yang semula dialokasikan untuk kegiatan yang sama dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang masih prioritas disamping itu juga untuk mengurangi defisit anggaran tahun 2017.
8. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Setiap pengalokasian anggaran belanja dalam APBD tahun 2017 tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh alokasi anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran.
9. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Kota Banjarbaru.

2.2.3 Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Rencana Kerja Bappeda Kota Banjarbaru dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana kinerja adalah kegiatan Bappeda Kota Banjarbaru untuk merubah keadaan dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik dengan tingkat capaian yang terukur. Dengan telah ditetapkan target capaian dari rencana kinerja ini maka akan memudahkan dalam pengukuran kinerja.

Rencana kinerja berisikan sasaran indikator keluaran digambarkan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Tabel 2.3 Target Kinerja BAPPEDA Kota Banjarbaru

Indikator Sasaran	Program	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2		3	4
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1. Jumlah Materai @ Rp. 3000,- / @ Rp. 6000,-		100 lbr 500 lbr	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,-
1. Terbayarnya listrik, telepon dan air		12 bulan	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	167.499.600,-
1. Petugas Kebersihan kantor		2 orang	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.400.000,-
1. Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		35 jenis	4. Penyediaan ATK	20.000.000,-
1. Jumlah barang cetakan penggandaan / fotocopy		9 jenis 160.852 lbr	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,-
1. Jumlah alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih		4 jenis / 12 jenis	6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.500.000,-
1. Jumlah surat kabar		84 eks	7. Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundangan	7.799.400,-
1. Jumlah makan minum harian pegawai 2. jumlah makan dan minum rapat 3. jumlah makan dan minum tamu		7.200 ktk 200 kotak 131 kotak	8. Penyediaan Makanan Dan Minuman	110.952.000,-
1. Koordinasi dan konsultasi ke kecamatan dan kelurahan 2. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam propinsi 3. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah luar propinsi		50 Ok 47 Ok 28 ok	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	930.430.217,-
2. Jumlah PTT / jumlah kontrak / biaya jaga malam		3 orang 9 orang 2 orang	10. Penyediaan Jasa Non PNS	251.460.000,-
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1. Ruang Tamu Pimpinan 2. Ruang Laktasi		1 buah 1 buah	1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	221.100.000,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

1. Jenis Alat penyimpanan perlengkapan kantor		1 jenis	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	187.800.000,-
2. Jenis alat rumah tangga lainnya		3 jenis		
1. Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor yang diadakan		1 jenis	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	67.100.000,-
1. Jumlah Mebeleur yang diadakan		4 jenis	4. Pengadaan Mebeleur	48.000.000,-
1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		10 jenis	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	130.000.000,-
1. Jumlah mobil jabatan		2 unit	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	52.370.000,-
1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2		11 unit	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	77.015.700,-
2. Pemeliharaan mobil operasional		1 unit		
1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		13 macam	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	36.000.000,-
Meningkatnya kapasitas dan wawasan SDM	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			
1. Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat non formal		22 orang	1. Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal	98.810.000,-
Perencanaan dan Pelaporan Keuangan tepat waktu	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1. Renja, Renja Perubahan, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Realisasi anggaran, Renstra		5 dok	1. Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.250.000,-
1. Laporan asset/barang inventaris kantor semester I dan II		10 buah	2. Perencanaan dan pelaporan manajemen asset/barang	6.167.000,-
2. Jumlah pengelola asset yang bertambah pengetahuan		2 orang		
3. Laporan SKPD, Laporan Keuangan/Triwulan, Usulan Kegiatan		5 Dok	3. Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Rp. 12.815.000,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Perubahan 2017, Kegiatan 2018/ Usulan RKA 2017/Perubahan dan Usulan 2018, Laporan Realisasi				
--	--	--	--	--

Indikator Sasaran	Program	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2		3	4
Meningkatnya ketersediaan data/informasi	Program Pengembangan data/informasi			
1. Dokumen Pencapaian SPM		1 dokumen	1. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	16.513.500,-
1. Buku Statistik Kota Banjarbaru 2016 2. Dokumen SIPD 3. Aplikasi data statistik 4. Aplikasi pelaporan kinerja keuangan		1 buku 1 dok 1 aplikasi 1 aplikasi	2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	173.358.000,-
1. Buku Indikator Makro Kota Banjarbaru tahun 2016 2. Aparatur Statistik yang menerima Peningkatan wawasan		1 buku 3 orang	3. Penyusunan dan Analisis data/informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	66.370.000,-
1. Leaflet selang pandang kota Banjarbaru 2. Booklet profil kota Banjarbaru 3. Updating Web Site Bappeda		1 dokumen 1 dokumen 1 kali	4. Penyusunan profil daerah	81.854.000,-
Meningkatnya kerjasama pembangunan daerah	Program Kerjasama Pembangunan			
1. Persentase koordinasi citynet		100 %	1. Fasilitasi Kerjasama Dengan usaha/lembaga dunia	2.160.800,-
Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan	Program pengembangan dan Penelitian			
1. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan		3 kali	1. Diseminasi hasil penelitian	27.318.400,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

diseminasi hasil		2 kali		
2. Terlaksananya diseminasi hasil penelitian kota Banjarbaru				
1. Penyelenggaraan jaringan penelitian kota Banjarbaru		1 kali laporan	2. Jaringan Penelitian Pendidikan	10.750.000,-
2. Seminar/sosialisasi		1 kali		
3. Rakorda Jarlit Tahun 2016		1 kali laporan		
1. Tersedianya dokumen SIPD		25 Eks	1. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	34.625.000,-
2. Website Bappeda terbaru		1 kali		
1. Terselenggaranya kegiatan penelitian		2 judul	1. Penelitian dan pengembangan sosial Ekonomi Pemerintah	163.767.000,-

Indikator Sasaran	Program	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2		3	4
Terwujudnya efektifitas perencanaan pembangunan berbasis informasi data spasial menuju kebijakan satu peta	Program perencanaan prasarana Wilayah dan SDA			
1. Dokumen Data Base pemanfaatan dan penggunaan lahan kecamatan Banjarbaru Selatan		1 dokumen dan peta	1. Penyusunan Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SD Air	1.917.493.500,-
2. Dokumen Data Base pemanfaatan dan penggunaan lahan kecamatan Landasan Ulin		1 dokumen dan peta		
1. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan sarana Prasarana Wilayah dan SDA			2. Koordinasi perencanaan pembangunan Prasarana dan Wilayah SD Air	14.355.400
1. Dokumen Review Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Banjarbaru		1 dokumen	1. Penyusunan perencanaan pembangunan pemukiman dan lingkungan hidup	843.537.950,
2. Dokumen review perencanaan teknis umum rencana induk jaringan jalan kota banjarbaru		1 dokumen		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

3. Dokumen database infrastruktur Kota Banjarbaru				
2. Rapat Koordinasi perencanaan pembangunan permukiman dan lingkungan hidup		1 dokumen rakor	1. Koordinasi perencanaan pembangunan pemukiman dan Lingkungan hidup	536.078.850
Terlaksananya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA			
1. Dokumen Monitoring dan evaluasi		1 dokumen	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	8.412.000

Indikator Sasaran	Program	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2		3	4
Meningkatnya pembangunan bidang ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
1. Rapat Koordinasi perencanaan bidang ekonomi		4 kali	1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	10.776.000
1. kajian analisis potensi ekonomi		40 eks	2. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah	223.347.000
2. Buku Profil ekonomi kota Banjarbaru 2017		40 eks		
3. Kajian analisis kondisi sosial ekonomi kota banjarbaru		40 eks		
Meningkatnya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Program Perencanaan Sosial Budaya			
1. Rakor bidang social budaya		10 kali	1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya	43.620.000
2. Peningkatan kapasitas/wawasan aparatur bidang sosial budaya		2 kali		
1. Penyusunan desain kamufase rumah kumuh		1 dok	1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial dan budaya	173.430.600
2. Dokumen penyusunan bidang sosbud		3 dok		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

3. Penyusunan perencanaan spasial bidang pendidikan dan kesehatan		1 dol		
4. Rapat koordinasi TKPK		3 kali	2. Pembinaan Program Kemiskinan	242.215.000
5. Rapat koordinasi Kotaku		4 kali		
6. Rapat pendataan kemiskinan		3 kali		
7. Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas pelaksana program kemiskinan		20 kali		

Indikator Sasaran	Program	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2		3	4
Menigkatnya kapasitas sumber daya aparatur perencana	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			
1. Bintek peningkatan kapasitas aparatur perencanaan		1 kali	1. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	93.418.400
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
1. Forum konsultasi publik penyusunan draft awal rancangan RKPD 2018		1 kali	2. Penyusunan Rancangan RKPD	129.090.000
2. Draft awal rancangan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2018 dan perubahan 2017		2 dok		
3. Revisi perda RPJMD 2016-2021		1 Perda		
1. Forum SKPD/Gabungan SKPD		1 kali	3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	195.769.000
2. Pra Musrenbang kota		1 kali		
3. Musrenbang Kota		1 kali		
1. Rakor pengendalian dan pengawasan rencana pembangunan		4 kali	4. Monev pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	94.273.500
2. Dokumen evaluasi rencana pembangunan kota banjarbaru tahun 2017		1 dok		
1. Aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah		1 aplikasi	5. Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan, monev daerah	110.250.000
1. dokumen LKPJ		1 dokumen	6. Koordinasi penyusunan	71.536.000



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

walikota banjarbaru		LKPJ Walikota	
---------------------	--	---------------	--

Tabel 2.4 Pencapaian Target Kinerja BAPPEDA Kota Banjarbaru

NO	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	
			(Rp)	(Rp)	%
	1.06.1.06.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	1.06.1.06.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3,300,000	100
2	1.06.1.06.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air Dan Listrik	167.499,600	103,287,648	61,66
3	1.06.1.06.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	14.400.000	14,400,000	100
4	1.06.1.06.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis kantor	20.000.000	20,000,000	100
5	1.06.1.06.1.01.11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	29.949.900	100
6	1.06.1.06.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.500.000	10,484,000	100
7	1.06.1.06.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.779.400	7,779,400	100
8	1.06.1.06.1.01.17	Penyediaan makanan Dan Minuman	110.952.000	94,046,000	84,76
9	1.06.1.06.1.01.18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	930.430.217	805,072,201	86,52
10	1.06.1.06.1.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	251.460.000	238,950,000	95,02
	1.06.1.06.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	1.06.1.06.1.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	187.800.000	158,387,000	84,33
3	1.06.1.06.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	79.600.000	29,450,000	36,99
4	1.06.1.06.1.02.10	Pengadaan Mebeleur	48.000.000	24,587,200	51,22
5	1.06.1.06.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	130.000.000	112,725,000	86,71
6	1.06.1.06.1.02.23	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	52.370.300	35,231,200	67,27
7	1.06.1.06.1.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	77.015.700	37,803,583	49,08
8	1.06.1.06.1.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	800,000	8
9	1.06.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	36.000.000	26,830,000	74,52
10	1.06.01.02.24	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	121.000.000	117,700,000	97,27
	1.06.1.06.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	1.06.1.06.1.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	98.810.000	36,470,170	36,9



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

	1.06.1.06.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			
1	1.06.1.06.1.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	12.815.000	12,799,000	100
2	1.06.1.06.1.06.09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset / Barang	6.167.000	5,317,000	86,21
3	1.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.250.000	15,250,000	100
	1.06.01.16	Program Kerjasama Pembangunan			
1	1.06.01.16.06	Koordinasi kerjasama antar daerah	2.160.800	413,000	19,04
	1.06.01.20	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah			
1	1.06.01.20.03	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	93.418.400	52,845,400	56,56
	1.06.1.06.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
1	1.06.1.06.1.21.08	Penyusunan Rancangan RKPD	129.090.000	89,014,000	68,95
1	1.06.1.06.1.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	195.769.000	162,240,000	82,87
2	1.06.1.06.1.21.10	Penetapan RKPD	24.895.000	21,685,500	87,10
3	1.06.1.06.1.21.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	140.647.000	75,187,000	53,45
6	1.06.1.06.1.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	94.273.000	84,099,500	89,20
	1.06.1.06.1.21.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	140.647.000	75,187,000	53,45
	1.06.1.06.1.21.15	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	110.250.000	109,475,000	99,29
1	1.06.1.06.1.21.17	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	71.536.000	61,540,000	86,02
2	1.06.1.06.1.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	240,837,000	191,094,950	79,34
3	1.06.1.06.1.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	10.776.000	9,649,950	89,55
4	1.06.1.06.1.22.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6.750.000	6,252,200	92,62
5	1.06.1.06.1.22.09	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi	223.347.000	175,192,800	78,43
6	1.06.1.06.1.23	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya			
7	1.06.1.06.1.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	43.620.000	15,220,000	34,89
8	1.06.1.06.1.23.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12.450.000	8,490,000	68,19



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

9	1.06.1.06.1.23.07	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial dan budaya	173.430.000	165,750,000	95,57
	1.06.1.06.1.23.06	Pembinaan Program Kemiskinan	242.215.000	212,800,000	87,85
1	1.06.1.06.1.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			
2	1.06.1.06.1.24.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	8,412,000	8,371,700	99,52
3	1.06.1.06.1.24.07	Koordinasi perencanaan pembangunan pemukiman dan Lingkungan hidup	15,529,000	15,455,700	99,52
4	1.06.1.06.1.24.08	Penyusunan perencanaan pembangunan pemukiman dan Lingkungan Hidup	536,078,850	532,249,850	99,28
5	1.06.1.06.1.24.09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan prasarana Wilayah dan SDA	13.215.400	4,298,400	32,52
6	1.06.1.06.1.24.10	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	1,917,493,500	1,897,753,500	98,97
	1.06.1.06.1.26	Program Pengembangan dan Penelitian			
1	1.06.1.06.1.26.01	Diseminasi hasil penelitian	27.318.400	14,373,200	52,61
2	1.06.1.06.1.26.05	Jaringan Penelitian	10,750,000	5,234,000	48,68
3	1.06.1.06.1.26.06	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	163.767.000	152,560,000	93,15
4	1.06.1.06.1.26.07	Penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi dan teknologi	34,625,000	26,478,000	76,47
JUMLAH			9,997,381,167	8,927,596,000	89,29